

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Agensi**

##### **2.1.1 Pengertian Teori Agensi**

Teori agensi adalah suatu konsep yang menggambarkan relasi antara prinsipal (pemberi tugas) dan agen (penerima tugas).<sup>1</sup> Dalam hal ini prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk menjalankan tugas tertentu demi mencapai tujuan organisasi. Namun, dalam praktiknya, teori ini muncul karena adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, terutama ketika agen (dalam hal ini manajemen) memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal (pemegang saham).

Keraguan terhadap perilaku manajemen menjadi dasar munculnya teori ini, karena manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap (asimetri informasi) dan bisa saja mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal menyewa atau menunjuk agen untuk memantau dan mengevaluasi perilaku manajemen. Proses pengawasan inilah yang menimbulkan apa yang disebut sebagai biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

---

<sup>1</sup> R A Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Ugm Press, 2018), 63.

Dengan demikian, teori agensi menekankan pentingnya sistem pengawasan dan insentif yang tepat agar manajemen dapat bertindak selaras dengan tujuan perusahaan dan meminimalkan konflik kepentingan antar pihak yang terlibat.

### 2.1.2 Jenis-jensi Teori Agensi

Permasalahan keagenan terjadi ketika diperlukan upaya mengarahkan agen agar bertindak guna mengoptimalkan kemakmuran pemberi kontrak, sehingga memunculkan biaya terkait keagenan. Ada 3 jenis biaya keagenan:<sup>2</sup>

1. Biaya Pemantauan (*Monitoring Cost*)

Pengeluaran ini diperuntukkan oleh prinsipal untuk mengawasi agen dan mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk menilai, memantau, dan mengatur tindakan agen.

2. Biaya Pengikatan (*Bonding Cost*)

Biaya ini dikeluarkan untuk memastikan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

3. Kerugian Residual (*Residual Loss*)

Kerugian ini merujuk pada pengurangan kekayaan principal akibat tindakan agen yang tidak sejalan dengan upaya memaksimalkan kekayaan principal. Dalam konteks ini, manajer dapat memanfaatkan informasi asimetris untuk melakukan aktivitas yang menguntungkan diri mereka

---

<sup>2</sup> Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*.

sendiri. Mereka memiliki akses lebih banyak terhadap informasi mengenai kondisi perusahaan dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan laba melalui penghindaran pajak, sehingga kinerja keuangan terlihat lebih baik. Namun, pemilik modal umumnya tidak mendukung peningkatan laba yang dicapai melalui penghindaran pajak, karena hal ini berpotensi menimbulkan risiko yang tidak diinginkan.

## **2.2. Profitabilitas**

### **2.2.1 Pengertian Profitabilitas**

Definisi profitabilitas yakni peningkatan nilai ekuitas dari transaksi lain yang mempengaruhi entitas selama satu tahun tertentu (kecuali hasil investasi dan pemilik).<sup>3</sup> Rasio profitabilitas adalah serangkaian rasio menggambarkan bagaimana likuiditas, pengelolaan aset, dan utang mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan berhasil memperoleh laba yang menunjukkan keberhasilan dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan pembiayaan. Dalam bisnis jasa, tujuan utama operasi adalah menghasilkan keuntungan .<sup>4</sup>

Profitabilitas yang tinggi cenderung meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan karena jumlah laba yang

---

<sup>3</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Kerangka Teori Dan Tujuan Akuntansi Syariah* (Pustaka Quantum, 2008).

<sup>4</sup> G R Alifedrin en E A Firmansyah, *Risiko Likuiditas Dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran Fdr, Lad, Lta, Npf, Dan Car* (Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023), 26,

dilaporkan juga besar. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak sebagai upaya meminimalkan kewajiban tersebut.<sup>5</sup> Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi sering kali menghadapi konflik kepentingan antara upaya memaksimalkan keuntungan dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakseimbangan ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam perencanaan pajak sebagai bentuk efisiensi biaya, meskipun hal ini bertentangan dengan kepentingan otoritas pajak.

### 2.2.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas antara lain :<sup>6</sup>

#### 1) *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* yakni ukuran yang menunjukkan sejauh mana entitas dapat mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan setelah pajak. ROA menggambarkan skala efisiensi aset dalam mendukung pencapaian profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan Return on Assets (ROA), dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

---

<sup>5</sup> Kartika and Nurhayati, “Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Predictor Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018).”

<sup>6</sup> E Siswanto, *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar-Oleh: Dr, Ely Siswanto, S. Sos, MM–Cet. I–Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang*, 2021.

## 2) *Return On Equity (ROE)*

*Return on Equity (ROE)* yakni indikator yang mengukur sejauh mana entitas mampu menghasilkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan modal yang dimiliki. ROE merefleksikan tingkat efisiensi penggunaan modal ekuitas dalam mendukung profitabilitas perusahaan.

## 3) *Profit Margin Ratio*

*Profit Margin Ratio* menilai potensi entitas dalam memperoleh keuntungan dari setiap unit penjualan yang diperoleh. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan

## 4) *Basic Earning Power*

*Basic Earning Power* menunjukkan sejauh mana entitas dapat menghasilkan laba operasional (EBIT) dengan cara memanfaatkan seluruh aset miliknya.

## 2.3. Ukuran Perusahaan

### 2.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan skala perusahaan yang diukur melalui total aset atau total penjualan bersih. Apabila total aset semakin tinggi, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Aset yang besar menandakan adanya modal yang lebih banyak, sementara volume penjualan yang tinggi menunjukkan perputaran uang yang besar. Perusahaan dengan peningkatan penjualan yang signifikan

umumnya memerlukan jumlah sumber daya yang besar juga , sementara itu apabila tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih rendah hanya memerlukan sumber daya dalam jumlah yang lebih kecil.<sup>7</sup>Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai gambaran dari besarnya aset yang dimiliki.

Perusahaan yang memiliki kinerja dan nilai perusahaan yang lebih tinggi umumnya cenderung melakukan penghindaran pajak dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang kinerjanya relatif lemah. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan nilai perusahaan yang tinggi umumnya memiliki motivasi yang lebih besar untuk menjaga reputasi, kepatuhan regulasi, dan kepercayaan investor.<sup>8</sup>

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset, dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln(Total Aset)$$

---

<sup>7</sup> S E Hery, *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2023).

<sup>8</sup> Arswendy Danardhito, Hendro Widjanarko, and Heru Kristanto, "Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan Dan Nilai Perusahaan," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 7, no. 1 (2023): 45–56.

### 2.3.2 Jenis-jenis Ukuran Perusahaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 membagi ukuran perusahaan menjadi :<sup>9</sup>

#### 1) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan entitas ekonomi yang beroperasi secara independen, dikelola oleh pihak individu atau entitas yang tidak terkait dengan entitas anak. Usaha ini memenuhi syarat sebagai usaha kecil berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### 2) Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan entitas ekonomi yang beroperasi secara independen, dikelola individu atau entitas yang tidak terhubung dengan entitas lain. Usaha ini mempunyai total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### 3) Usaha Besar

Usaha besar ialah entitas bisnis yang dikelola oleh entitas dengan total pendapatan tahunan yang lebih unggul dari usaha menengah.

---

<sup>9</sup> Apriwandi, Debbie Christine, and Rachmat Hidayat, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Audit Delay," *Jurnal Ekuilnomi* 5, no. 2 (2023): 225–236.

## 2.4. Agresivitas Pajak

### 2.4.1 Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak oleh perusahaan merupakan upaya untuk meminimalkan biaya politik yang dihadapi. Agresivitas pajak perusahaan dapat didefinisikan secara luas sebagai manajemen untuk menurunkan pendapatan kena pajak dengan kegiatan perencanaan pajak, baik legal atau illegal.<sup>10</sup> Keuntungan dari penghindaran pajak adalah penghematan yang lebih besar, yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan meningkatkan laba.

Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.4.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Agresivitas Pajak

Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak :<sup>11</sup>

#### 1) Profitabilitas

Salah satu pendorong perusahaan guna melaksanakan penghindaran pajak yakni skala profitabilitas yang tercermin dari *Return on Assets (ROA)*. Apabila profitabilitas perusahaan tinggi, besar kemungkinan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Penyebabnya yakni kecenderungan

<sup>10</sup> M A Dr. Amrie Firmansyah en S T A Gitty Ajeng Triastie, *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* (Penerbit Adab, n.d.), 20,

<sup>11</sup> Winanada wahana Indah Novriyant, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 35, no. 1 (2024): 1–16.

perusahaan dengan laba tinggi untuk lebih mudah mengeksploitasi celah-celah dalam kewajiban pajak mereka.

## 2) *Leverage*

*Leverage* yakni rasio yang menunjukkan sejauh mana entitas bergantung terhadap utang untuk menadani kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar proporsi pendanaan yang diperoleh dari utang, yang akhirnya meningkatkan beban bunga. Beban bunga bisa mengurangi jumlah pajak wajib dibayar perusahaan.

## 3) Ukuran Perusahaan

Apabila ukuran perusahaan besar, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dengan tujuan untuk memaksimalkan pengurangan beban pajak.

## 4) Intensitas Aset Tetap

Faktor keempat adalah tingkat kepemilikan aset tetap. Apabila jumlah aset tetap tinggi, semakin tinggi juga biaya depresiasi yang bisa dikurangkan, akhirnya mengurangi total pajak yang wajib dibayar. Dengan demikian, perusahaan dengan aset lebih banyak cenderung tidak terlibat dalam upaya penghindaran pajak.

#### 5) Pertumbuhan Penjualan

Kenaikan dalam laju pertumbuhan penjualan akan memperbesar laba, sehingga akan menstimulasi entitas untuk terlibat dalam penghindaran pajak.